

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **5.1. Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)**

Pemilihan Kepala Daerah merupakan tonggak baru dalam demokrasi di Indonesia. Bahwa esensi demokrasi adalah kedaulatan berada di tangan rakyat melalui pemilihan secara langsung yang dilakukan oleh masyarakat sebagai pemilih dan diselenggarakan secara jujur, adil dan aman. Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu bentuk rekrutmen politik dimana sistem penyeleksian masyarakat terhadap calon kepala daerahnya untuk menjadi pemimpin rakyat dengan menggerakkan jalannya roda pemerintahan daerah. Pemilihan kepala daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang bertanggung jawab kepada DPRD. Komisi Pemilihan Umum Daerah menyampaikan pemilihan kepala daerah kepada panitia pengawas Pilkada yang keanggotaannya terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Perguruan Tinggi, pers dan tokoh masyarakat.

Pemilihan Wali Kota dan wakil Wali Kota Kupang (Pilkada) diatur dalam Pasal 24 Ayat (5) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemilihan Daerah. Pemilihan Daerah merupakan kelanjutan dari proses reformasi politik dan kelembagaan pemerintahan yang bergulir kencang sejak munculnya era Reformasi dengan munculnya UU No. 22 Tahun 1999 kemudian diubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 yang disusul oleh PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan,

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan beberapa pasal diubah melalui PP No. 17 Tahun 2005.

Proses pemilihan Wali Kota dan wakil Wali Kota Kupang periode 2017 – 2022 dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017. Berdasarkan rincian dari KPU mengenai jumlah pemilih terdapat daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 235.265 pemilih, daftar pemilih pindahan (DPPH) sebanyak 426 pemilih dan daftar pemilih tetap tambahan (DPTb) sebanyak 5.408 pemilih di 660 TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang tersebar di 51 Kelurahan.

**Tabel 7. Jumlah DPT dalam Pilwalkot Kota Kupang Periode 2017 – 2022**

| Nama Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah TPS | Daftar Pemilih Tetap |           |
|----------------|------------------|------------|----------------------|-----------|
|                |                  |            | Laki-Laki            | Perempuan |
| Oebobo         | 8                | 141        | 26.740               | 26.838    |
| Alak           | 12               | 109        | 18.780               | 19.347    |
| Kelapa Lima    | 5                | 109        | 20.663               | 19.794    |
| Kota Raja      | 7                | 99         | 15.902               | 16.983    |
| Maulafa        | 9                | 134        | 24.674               | 24.989    |
| Kota Lama      | 10               | 68         | 10.128               | 10.427    |
| <b>Total</b>   | <b>51</b>        | <b>660</b> | <b>235.265</b>       |           |

(sumber : portal [www.pemilu2017.kpu.go.id](http://www.pemilu2017.kpu.go.id))

Berdasarkan rincian tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah daftar pemilih tetap di Kecamatan Maulafa sebanyak 24.674 DPT laki-laki dan DPT perempuan sebanyak 24.989 dengan jumlah secara keseluruhan sebanyak 49.663 DPT yang tersebar di 9 kelurahan dan 134 TPS. Sedangkan jumlah DPT yang ada di Kelurahan Penfui sebanyak 3.692 DPT dengan tingkat partisipasi dalam pemilihan yaitu 59,3 % atau 2.191 DPT yang ikut memilih dan 40,7 % atau 1.501 DPT yang tidak ikut memilih berdasarkan data KPU hasil hitung (Form C1)

Kelurahan Penfui. Hal tersebut sebagaimana yang terlampir dalam tabel berikut ini :

**Tabel 8. Hasil Perhitungan Suara per TPS di Kelurahan Penfui**

| TPS          | Jumlah Pemilih |              | Pegguna Hak Pilih |              |
|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|
|              | Laki-Laki      | Perempuan    | Laki-Laki         | Perempuan    |
| 1            | 197            | 170          | 79                | 98           |
| 2            | 172            | 171          | 107               | 111          |
| 3            | 125            | 164          | 103               | 90           |
| 4            | 242            | 222          | 123               | 138          |
| 5            | 207            | 202          | 111               | 142          |
| 6            | 115            | 136          | 111               | 129          |
| 7            | 73             | 198          | 31                | 92           |
| 8            | 178            | 184          | 130               | 146          |
| 9            | 175            | 165          | 83                | 100          |
| 10           | 244            | 243          | 126               | 141          |
| <b>TOTAL</b> | <b>1.728</b>   | <b>1.855</b> | <b>1.004</b>      | <b>1.187</b> |

(sumber : Data Form C1 Kota Kupang)

Pelaksanaan pemilihan Wali Kota dan wakil Wali Kota Kupang periode 2017 – 2022 diikuti oleh dua paket pasangan calon, yaitu paket FirmanMu (Jefirstson R. Riwu Kore dan Hermanus Man) dan paket Sahabat (Jonas Salean dan Nikolaus Fransiskus). Perolehan suara terhadap kedua paket pasangan calon di Kelurahan Penfui berimbang, dimana Paket Sahabat hanya mengungguli paket FirmanMu dengan selisih sebesar 0,6 %. Paket FirmanMu mendapatkan perolehan suara sebesar 49,70 % dan Paket Sahabat mendapat perolehan suara sebesar 50,30 %. Suara sah sebanyak 2.167 suara atau 98,9 % dan suara tidak sah sebanyak 24 suara atau 1,1 %. Hal tersebut seperti yang tertera dalam tabel berikut ini:

**Tabel 9. Perolehan Suara Pilwalkot Kota Kupang Periode 2017 – 2022 di Kelurahan Penfui**

| <b>Paket</b>  | <b>Jumlah Suara</b> | <b>Presentase</b> |
|---|---------------------|-------------------|
| FirmanMu (Jefirstson R. Riwu Kore dan Hermanus Man) | 1.077               | 49,70 %           |
| Sahabat (Jonas Salean dan Nikolaus Fransiskus)      | 1.090               | 50,30 %           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>2.167</b>        | <b>100 %</b>      |

(sumber : Data Form C1 Kota Kupang)

## **5.2.Tahapan Pemilihan Walikota Kupang Periode 2017 -2022**

Pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota merupakan suatu bentuk preferensi politik masyarakat dalam hal untuk dipilih, memilih dan mengontrol jalannya proses pemilihan walikota dan wakil walikota. Dalam proses pemilihan walikota dan wakil walikota Kupang, KPU menetapkan tatacara pemilihan walikota dan wakil walikota berdasarkan PKPU Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 4 tentang tahapan pemilihan terdiri atas tahapan persiapan dan tahap pelaksanaan. Kegiatan pemilihan walikota dan wakil walikota Kupang periode 2017 – 2022 dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu masa tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Mengacu kepada UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 5 ayat 1, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah meliputi tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan.

### **5.2.1.Tahapan Persiapan**

Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 1, meliputi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilihat dari pasal 5 ayat 2, yakni:

- a. Perencanaan program dan anggaran
- b. Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan
- c. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tatacara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan
- d. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS
- e. Pembentukan Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, Kecamatan, PPL dan TPS
- f. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan
- g. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih

#### **5.2.2. Tahapan Pelaksanaan**

Adapun tahap penyelenggaraan sebagaimana yang tertera pada pasal

5 ayat 3, yang meliputi:

- a. Pendaftaran bakal Calon Gubernur, Bupati/Walikota
- b. Uji publik
- c. Pengumuman pendaftaran Calon Gubernur, Bupati/Walikota
- d. Pendaftaran Calon Gubernur, Bupati/Walikota
- e. Penelitian persyaratan Calon Gubernur, Bupati/Walikota
- f. Penetapan Calon Gubernur, Bupati/Walikota
- g. Pelaksanaan kampanye
- h. Pelaksanaan pemungutan suara
- i. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara
- j. Penetapan calon terpilih

- k. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan
- l. Pengusulan, pengesahan dan pengangkatan calon terpilih

### **5.3. Profil Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang Periode 2017-2022**

#### **5.3.1. Pasangan Firman Mu**

##### **1) Jefirstson R. Riwu Kore**

Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH lahir di Kupang pada tanggal 13 Januari 1960, anak pertama dari delapan bersaudara dari pasangan bapak Drs. A. D. Riwu Kore dan ibu E. M. Riwu Kore. Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH menikah dengan Ny. Hilda Manafe, SE. MM dan dikaruniai 2 orang anak yaitu, Firda R. Riwu Kore dan Herison R. Riwu Kore. Jefirstson R. Riwu Kore berasal dari etnis Sabu.

##### **a) Riwayat Pendidikan**

- SD Negeri Namosain Kupang Tahun 1972
- SMP Negeri 1 Kupang Tahun 1975
- SMPP Negeri 34 Kupang Tahun 1979
- Sarjana (S1) Akuntansi di Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Denpasar – Bali Tahun 1986
- Magister (S2) Keuangan di Universitas Pelita Harapan Jakarta Tahun 2005 dan 2013
- Doktor (S3) Ilmu Ekonomi di Universitas 17 Agustus Surabaya Tahun 2010

## **b) Pengalaman Pekerjaan**

- Dosen pada Universitas Pendidikan Nasional Denpasar-Bali pada tahun 1987-1992
- Manajer Keuangan di Puri Ratih Hotel, Industri Perhotelan, Kuta-Bali tahun 1989-1992
- Assistant Comptroller Nusa Indah Hotel & Bali International Convention Center, Hotel Bintang 5 dan Industri Jasa Konvensi dan Eksibisi (MICE), Nusa Dua Bali tahun 1992-1993
- Direktur Utama PT. Putra Nusa Lontar, Industri Kantung Semen dan Laminasi (Fabrikasi) Jakarta tahun 2000-Sekarang
- Direktur Keuangan dan Pengawasan, Industri Jasa Konvensi dan Eksibisi (MICE) Jakarta pada Balai Sidang Convention Center tahun 1993-2007
- Anggota DPR RI Komisi X Fraksi Demokrat Periode 2009-2014
- Anggota DPR RI Komisi X Fraksi Demokrat Periode 2014-2016

## **2) Hermanus Man**

dr. Hermanus Man Anak memulai kariernya menjadi kepala Puskesmas Roga di Ende, lahir di Desa Pau-Ruteng, Manggarai pada tanggal 3 September 1949, anak ke 6 dari 12 bersaudara dari pasangan orang tua bapak Petrus Hanto (alm) dan ibu Maria Awuk (Almh). Berkarya sebagai dokter di Ende pada tanggal 15 Agustus 1978, menikah di Jopu-Ende dengan Ibu Elisabeth Liez Rengka SST. Dari

pernikahan dengan Ibu Elisabeth Liez Rengka dikaruniai 4 orang anak yaitu, Rafael Paulus Helmy Herman Putra, Maria Petra Herly Herman Putri, Maria Gradia Nguraman, Martinus Gradus Woloman. Hermanus Man merupakan putera asal Manggarai.

**a) Riwayat Pendidikan**

- Sekolah Rakyat di Ruteng tamat tahun 1962
- SMPK Tubi di Ruteng tamat tahun 1965
- SMAK Syuradikara di Ende Tamat tahun 1968
- Fakultas Kedokteran UNAIR di Surabaya tamat tahun 1976

**b) Riwayat Pekerjaan**

- Kepala Puskesmas Roga Ende tahun 1979
- Kepala Dinas Kesehatan Alor Tahun 1979-1983
- Kepala Dinas Kesehatan Ende/Kankandep Ende Tahun 1983-1986/1990
- Kepala Kantor Departemen Kesehatan Sikka tahun 1990-1997
- Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kupang tahun 1997-2000
- Kepala Dinas Kesehatan Kupang Tahun 2000-2006
- Wakil Wali Kota Kupang Periode 2012-2017

**5.3.2.Pasangan Sahabat**

**1) Jonas Salean**

Jonas Salean,SH.,M.Si lahir di Oetete, Kupang pada tanggal 12 Maret 1958 dari pasangan Ayah Jacob Salean (Alm) dan Ibu A.



Julianlean-Malesi (Almh). Ia merupakan anak ke 9 dari 11 bersaudara. Jonas Salean menikah dengan A. Resdyana Ndapamerang, B.Sc pada tanggal 06 November 1986. Dari pernikahan tersebut, dikaruniai 2 orang anak, Meridiani Christiani Salean dan Adriani Aprilia Salean. Jonas Salean berasal dari etnis Rote.

**a) Riwayat Pendidikan**

- Sekolah Dasar di Bokonusan tamat tahun 1971
- SLTP di Kupang tamat tahun 1974
- SMPPN 34 di Kupang tamat tahun 1977
- Fakultas Hukum di Universitas Negeri Jember tamat tahun 1984
- Pasca Sarjana Studi Pembangunan di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga tamat tahun 2002

**b) Riwayat Pekerjaan**

- Kasubag Tata Usaha pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dati II Kupang tahun 1986
- Pelaksana Tugas Harian Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dati II Kupang tahun 1991
- Kabag Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dati II Kupang tahun 1991
- Sekretaris Kota Administratif Kupang tahun 1993
- Asisten Administrasi Pembangunan pada Kotamadya Dati II Kupang tahun 1996

- Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Dati II Kupang tahun 1998
- Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang tahun 1999 – 2002
- Sekretaris Daerah Kota Kupang tahun 2002 – 2007
- Staf Pelaksana pada Sekretariat Daerah Kota Kupang tahun 2007
- Staf Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT tahun 2009 – 2010
- Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi tahun 2010 – 2012
- Wali Kota Kupang tahun 2012 – 2017

## **2) Nikolaus Fransiskus**

Nikolaus Fransiskus, S.IP lahir di Lela pada tanggal 06 Mei 1962 dari pasangan Ayah dan Ibu. Nikolaus Fransiskus menikah dengan Maria Murniman dan dikaruniai satu orang anak yaitu Octoviano Rivaldo Frans. Beliau berasal dari etnis Flores.

### **a) Riwayat Pendidikan**

- SD Katolik Nita I sejak tahun 1967 – 1973
- SMP Kimang Buleng sejak tahun 1973 – 1976
- SMAK St. Gabriel sejak tahun 1977 – 1980
- Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sejak tahun 1998 – 2002

#### **b) Riwayat Pekerjaan**

- Koodinator Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup di Yayasan Masyarakat Sejahtera (Yasmara) Kupang pada tahun 1991
- Staf Ahli Bidang Pertanian di Yayasan Masyarakat Sejahtera (Yasmara) Kupang pada tahun 1999
- Anggota DPRD Kota Kupang pada tahun 1998 – 2014
- Ketua Komisi di DPRD Kota Kupang pada tahun 2009 – 2014

#### **5.4.Perilaku Pemilih**

Perilaku pemilih merupakan suatu tindakan seseorang maupun kelompok yang berkaitan dengan kepentingan maupun tujuan dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Perilaku politik merupakan pikiran dan tindakan manusia yang berkaitan dengan proses pemerintah. Perilaku pemilih merupakan salah satu dari bentuk perilaku politik.

Masyarakat memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pesta demokrasi seperti pilkada, karena merupakan satu kesatuan utuh dimana masyarakat menjadi faktor utama serta penentu berjalan suksesnya sebuah pelaksanaan pilkada. Oleh karena itu, kepedulian pemilih dalam mengikuti kegiatan politik pada pemilihan walikota Kupang periode 2017 -2022 ini, harus diikuti dengan kesiapan kandidat atau calon dalam memberikan suguhan terbaik mereka seperti visi dan misi yang jelas untuk membangun Kota Kupang yang

lebih baik. Keadaan yang demikian akan membentuk pola pikir masyarakat percaya bahwa aktor politik yang demikian memiliki mental pemenang. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh salah satu masyarakat Kelurahan Penfui, Bapak Adrianus Oli asal etnis Sabu (03/09/2019) yang mengatakan bahwa:

*“Para kandidat sudah sangat peduli terhadap masyarakat dengan sering meluangkan waktu untuk bertemu atau bertatap muka dengan masyarakat. Tapi kalau soal memilih dan tidak memilih itu tergantung dari haknya masyarakat. Namun saya sebagai masyarakat harus ikut memberikan hak suara saya di tiap pesta demokrasi tak terkecuali pemilihan walikota Kupang periode 2017 – 2022 ini. Karena saya berpikir, satu suara saja sangat berarti dan berguna dalam menentukan perkembangan dan pembangunan di Kota Kupang”.*

Hal tersebut juga ditambahkan oleh seorang warga masyarakat Kelurahan Penfui, Ibu Roberta Nahak asal etnis Belu (03/09/2019) yang menyatakan bahwa :

*“Di kelurahan Penfui sini kan merupakan multi etnis, dimana ada etnis Timor, Flores, Rote, Sabu, Bugis dan lain-lainnya, sehingga para kandidat dengan caranya masing-masing akan memberikan strategi politiknya agar mendapatkan simpatik dari masyarakat di kelurahan sini, seperti memberikan pendekatan atau tatap muka di masing-masing etnis dengan harapan mendapatkan dukungan suara, sehingga masyarakat bisa tahu latar belakang maupun sifat sang kandidat tersebut. Menyangkut siapa yang akan di gunakan masyarakat dalam memilih tinggal mereka (masyarakat) yang menentukan sendiri”.*

Hal tersebut dilengkapi lagi oleh seorang warga masyarakat Kelurahan Penfui, Bapak Afandi Akasal etnis Rote (05/09/2019), yang mengatakan bahwa :

*“Saya memilih salah satu calon karena calon tersebut memiliki asal etnis yang sama dengan saya, jadi saya harus memilih pasangan calon tersebut. Selain itu, pasangan calon tersebut pernah menjadi Walikota d Kupang periode yang juga telah membantu etnisnya dalam segala hal”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kecenderungan masyarakat dalam kesadaran politik masih ada, namun pengetahuan dan kepedulian terhadap pesta demokrasi ini hanya sebagian saja. Dari situasi seperti ini, diketahui bahwa sejauh mana peran kandidat maupun partai politik pengusung yang menjadi panutan dapat menentukan perilaku politik masyarakat dalam memilih.

### **5.5.Partisipasi Politik**

Partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting dan banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang. Secara umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik. Partisipasi politik sangat berpengaruh dalam demokrasi terhadap legitimasi oleh masyarakat dalam menjalankan pemerintahan. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing dalam menentukan pilihan mereka. Keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan kepala daerah sangatlah penting dimana peran-peran strategis warga negara akan mendorong kualitas demokrasi.

Berdasarkan data dari KPU, tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Kupang periode 2017 – 2022 tidak memenuhi target nasional yaitu 71,23 % dari 75,5 % yang telah ditetapkan berdasarkan jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (dalam Pos Kupang.com tanggal 18/02/2017). Beberapa faktor penghambat yang menjadikan tingkat partisipasi masyarakat rendah dalam memilih, antara lain :

- Rumitnya sistem administrasi
- Masyarakat yang sangat dinamis
- Minimnya kontestan yang bersaing
- Tidak maksimalnya sosialisasi dari KPU maupun Parpor dan Paslon

Hal ini menunjukkan bahwa tindakan tidak memilih lebih didominasi oleh rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemilihan walikota (Pilkada) dalam merubah situasi dan kondisi pemilih maupun bingungnya pemilih dalam memilih pemimpinnya yang hanya dua pasangan calon, seperti yang dikatakan oleh seorang warga masyarakat Kelurahan Penfui, Bapak Albertus Bhalu asal etnis Flores Ende, bahwa :

*“Saya tidak ikut memilih dikarenakan saya tidak mendapatkan undangan memilih, sehingga membuat saya heran. Padahal saya merupakan salah satu warga masyarakat Kelurahan Penfui yang memiliki hak dalam memilih. Mungkin alasan nama saya tidak ada disebabkan oleh administrasi saya yang belum valid.*

Dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Kupang tahun 2017, masyarakat di Kelurahan Penfui berpartisipasi juga dalam menentukan pemimpin daerahnya. Namun, angka pemilih yang tidak mengikuti pemilihan juga hampir berimbang dengan jumlah pengguna hak pilih, begitu pula dengan banyaknya surat suara yang tidak sah.

**Tabel 10. Jumlah Pemilih dan Tidak Memilih/Golput**

| Pemilih                    | Jenis Kelamin |              | Jumlah       |
|----------------------------|---------------|--------------|--------------|
|                            | Laki-Laki     | Perempuan    |              |
| Pengguna Hak Pilih         | 1.004         | 1.187        | 2.191        |
| Tidak Memilih              | 724           | 668          | 1.392        |
| <b>Jumlah Pemilih</b>      | <b>1.728</b>  | <b>1.855</b> | <b>3.692</b> |
| <b>Pemilih Disabilitas</b> | <b>1</b>      |              | <b>1</b>     |
| <b>Suara Sah</b>           | <b>2.167</b>  |              | <b>2.167</b> |
| <b>Suara Tidak Sah</b>     | <b>24</b>     |              | <b>24</b>    |
| <b>TOTAL SUARA</b>         | <b>2.191</b>  |              | <b>2.191</b> |

(sumber : Data Form C1 KPU Kota Kupang)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya sangat minim, dimana jumlah yang tidak memilih dan hampir sebanding dengan jumlah pengguna hak pilih di Kelurahan Penfui. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor tersebut diatas dan beberapa faktor lainnya seperti halnya tingkat pendidikan pemilih, kesibukan kerja dan sebagainya sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu masyarakat di Kelurahan Penfui, Bapak Kristianus Liwa asal etnis Flores Nagekeo (05/09/2019) yang mengatakan bahwa :

*“Masyarakat di Kelurahan sini (Penfui) sudah mulai tidak percaya dengan bualan-bualan politik para berdasi, karena mereka merasa sudah banyak ditipu dengan janji-janji manis yang pernah mereka terima dan juga tingkat pendidikan masyarakat disini yang bukan tidak tapi belum memahami pesta demokrasi politik, dimana saat itu mereka memilih pemimpin mereka khususnya di tingkat daerah seperti ini”.*

Pernyataan tersebut juga dilanjutkan lagi oleh Antonia Asbanu asal etnis Timor (05/09/2019) yang mengatakan bahwa :

*“Partisipasi masyarakat terhadap pemilihan walikota dan wakil walikota Kupang sudah terbilang lumayan berpartisipasi, namun ada sebagian masyarakat yang terpaksa harus rela untuk tidak mengikuti pemilihan tersebut karena dengan berbagai alasan mendasar yang tidak dapat ditunda atau ditolerir, seperti ada tugas keluar daerah dan pelajar yang keluar daerah serta kendala teknis lainnya. Tingkat golput yang terjadi di Kelurahan Penfui terjadi karena juga banyak yang merantau. Faktor lain juga yang menyebabkan tingkat golput yang tinggi dikarenakan permasalahan administratif dan kurangnya sosialisasi dari pihak yang berwenang”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan walikota dan wakil walikota Kupang periode 2017 – 2022 di Kelurahan Penfui masih sangat rendah sehingga hasil pemilihan tersebut dapat menguntungkan salah satu paslon tertentu. Hal tersebut dapat memicu konflik di masyarakat, dimana adanya masyarakat yang tidak puas akan hasil tersebut.

#### **5.6.Politik Identitas Etnis dalam Pilwalkot Kota Kupang Periode 2017 – 2022**

Pemilihan walikota Kupang periode 2017–2022 merupakan kontestasi politik demokrasi dimana segala unsur maupun pihak berperan dalam kontestasi tersebut. Kedua pasangan calon yang bersaing dalam kontestasi politik tersebut mewakili beberapa etnis yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Paket FirmanMu mewakili etnis Sabu dan Flores sedangkan Paket Sahabat mewakili etnis Rote dan Flores, sehingga menimbulkan konstelasi politik masyarakat dimana mereka menginginkan putera daerahnya menjadi kepala daerah (Wali Kota) di Kota Kupang.



Pemilihan walikota Kupang belum berhasil untuk menghapuskan budaya primordial dalam masyarakat. Pemanfaatan politik etnis oleh calon kepala daerah sangat berpengaruh terhadap dukungan masyarakat. Persaingan politik yang melibatkan etnis dapat memicu konflik kultural dalam masyarakat. Selain itu, munculnya ekspresi politik masyarakat berdasarkan sentimen etnis memperlihatkan pendidikan politik masih belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Adrianus Oli asal etnis Sabu yang merupakan masyarakat di Kelurahan Penfui (03/09/2019), mengatakan bahwa :

*“Dalam pemilihan Wali Kota, saya memilih salah satu paslon tersebut karena memiliki kesamaan etnis dengan saya dan saya juga memilih berdasarkan hati nurani saya serta yakin bahwa akan menang. Kenapa saya memilih pasangan calon tersebut? Karena ketika mereka sudah duduk di kursi kepala daerah, maka mereka pasti akan melihat kita yang memilih mereka dan nama etnis kita akan dikenal dan disegani”.*

Kedua pasangan calon Walikota Kupang periode 2017 – 2022 berasal dari etnis Rote, Sabu dan Flores. Berdasarkan tabel no. 1 dapat dilihat bahwa penduduk etnis Rote di Kelurahan Penfui berjumlah sebanyak 958 jiwa, sedangkan etnis Flores sebanyak 848 jiwa dan etnis Sabu sebanyak 273 jiwa. Hal tersebut dapat dijadikan tolak ukur untuk melihat praktek politik etnis di Kelurahan Penfui dengan melihat hasil perolehan suara yang tertera pada tabel 7, dimana berdasarkan hasil perolehan suara tersebut pasangan calon Jonas Salean dan Nikolaus Fransiskus memperoleh suara sebanyak 1.090 suara ditambah dengan pemilih dari etnis lain yang ikut memilih, sehingga dapat disimpulkan

bahwa dalam pemilihan Walikota Kupang, praktek politik etnis sangat mungkin masih digunakan oleh masyarakat dilihat dari selisih jumlah hasil perolehan suara dan jumlah penduduk Rote di Kelurahan Penfui tidak berbeda jauh dimana selisih penduduk terhadap pasangan calon Jonas Salean dan Nikolaus Fransiskus sebesar 132 atau 12,11%, sedangkan pasangan calon Jefirstson R. Riwu Kore dan Hermanus Man tidak terlihat adanya politik etnisitas apabila dilihat dari selisih jumlah perolehan suara dengan jumlah penduduk Sabu sangat jauh dimana selisihnya sebesar 804 atau 74,66 %.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kepercayaan penduduk etnis Rote terhadap Paket Sahabat sangat kuat apabila dilihat dari selisih jumlah perolehan suara dengan jumlah penduduk Rote yang ada di Kelurahan Penfui. Etnis Flores menjadi terpecah karena masing-masing paslon memiliki wakil yang berasal dari etnis Flores. Hal tersebut merupakan salah satu aspek dalam penelitian ini untuk melihat praktek politik identitas etnis yang terjadi di Kelurahan Penfui. Walaupun adanya koalisi etnis yang sama tersebut terhadap calon wakil Walikota, tetapi pilihan politik masyarakat tetap berdasarkan atas kelompok etnisnya yang akan menjadi Walikota dan wakil Walikota Kupang, sebagai bentuk keterwakilan pimpinan pada tingkatan daerah Kota Madya. Hal tersebut seperti yang diutarakan oleh Kristianus Liwa asal etnis Flores Nagekeo (05/09/2019) bahwa :

*“Keterlibatan etnis disini dalam pemilihan Wali Kota Kupang dapat kita lihat dari berbagai aspek. Ada dari beberapa kelompok etnis yang mendeklarasikan diri untuk mendukung salah satu paslon.*

*Harapan mereka agar ada orang yang berasal dari etnis tersebut dapat menduduki kursi pemerintahan tertinggi di Kota Kupang”.*

Dalam proses pemilihan Walikota Kupang sangat terlihat adanya pengaruh yang kuat terhadap masyarakat di Kelurahan Penfui. Politik identitas etnis mempunyai pengaruh yang urgen dalam pelaksanaan pemilihan Walikota Kupang yang aman, tertib dan damai namun dapat berdampak terhadap konflik dan pembodohan politik rakyat yang sangat merugikan. Hal ini dikarenakan pemilih tidak melihat visi misi, rekam jejak dan kecerdasan intelektual dari masing-masing paslon melainkan berdasarkan kesamaan etnis.

Atribut dan bahasa etnis juga digunakan sebagai instrumen atau media dalam mengkampanyekan pasangan calon masing-masing kepada konstituen atau masyarakat (pemilih) dengan menekankan keetnisannya. Hal ini dilakukan agar pemilih dari etnis yang sama dengan pasangan calon tetap mendukung sehingga dapat mempengaruhi masyarakat karena memiliki persamaan identitas kultural. Kampanye menggunakan atribut etnis dapat menimbulkan ketegangan politik hingga konflik di tingkat elit maupun masyarakat.

Perbedaan bahasa antar etnis dapat menyebabkan perbenturan nilai-nilai yang telah melekat dalam keseharian masyarakat. Bahasa daerah digunakan oleh para kandidat sebagai saluran atau media komunikasi saat kampanye. Perbedaan bahasa daerah yang awalnya merupakan salah satu bentuk penghargaan satu sama lain, namun berubah menjadi sebuah perbedaan yang mengarah terhadap eksistensi masing-masing kelompok etnis.

Penggunaan simbol etnis dalam pemilihan Walikota Kupang yang terjadi di Kelurahan Penfui menjadi tolak ukur dalam memperoleh suara atau dukungan konstituen (masyarakat). Masing-masing calon pasangan Walikota Kupang, memperkenalkan diri mereka menggunakan simbol-simbol etnis tersebut. Penggunaan simbol etnis tersebut yang menjadi indikasi menguatnya sentimen etnis dalam pemilihan Walikota Kupang di Kelurahan Penfui. Hal ini juga dibenarkan oleh Ibu Yulita Manek asal etnis Flores Larantuka (05/09/2019), bahwa :

*“Pada saat tatap muka, salah satu pasangan calon menggunakan pakaian adat dan menggunakan bahasa daerahnya ketika berjumpa dengan masyarakat. Hal ini membuat masyarakat seakan dihargai dan bebas memberi pikiran dan masukan dari mereka untuk ditindak lanjuti ketika sudah menjadi pemimpin mereka”.*

Pola politik identitas etnis tersebut bertujuan untuk memberikan dan mendapatkan dukungan dari masyarakat terhadap kandidat dengan melakukan aksi kultural sebagai bentuk identitas etnis yang membentuk persamaan dengan kandidat dan mendekati dengan otoritas pilihan politik. Praktek politik identitas etnis yang terjadi dalam pemilihan Walikota Kupang ini sangat rentan akan terjadinya konflik antar etnis.

Tiap etnis yang ada di Kelurahan Penfui memperlihatkan terjadinya sikap biopolitik yang menggambarkan pola pilihan dalam memberikan dukungan politik sehingga tidak mencerminkan kebebasan dalam berpolitik yang dapat memicu terjadinya konflik etnis dalam kehidupan bermasyarakat. Tiap etnis juga mencoba untuk memberikan kontribusi dalam penguatan budaya dan

kemajemukan yang bertujuan untuk pengakuan eksistensi kultural sebagai bentuk kebebasan berekspresi dalam berbagai kegiatan budaya etnis.

Pelaksanaan pemilihan Walikota Kupang periode 2017 – 2022, menampilkan gerakan politik dan sosial masyarakat berdasarkan politik etnis, kepemilikan hak-hak sosial dan otonomi, kebebasan berekspresi dan berbudaya. Keberagaman etnis di Kelurahan Penfui harus dikembangkan dalam mempertahankan budaya lokal, namun secara politik, kelompok etnis tersebut juga harus menjunjung tinggi nilai demokrasi dan kecerdasan politik dengan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang berkaitan dengan nilai budaya yang ada di etnis masing-masing.

### 5.7. Hubungan antara Etnisitas dengan Kecenderungan Memilih

Penulis mendaftarkan para pemilih yang tersebar di 3 RT berbeda dan melihat kecenderungan memilih diantara mereka. Dalam hal ini, penulis ingin melihat dan mengetahui apakah faktor etnis sangat mempengaruhi terhadap kecenderungan memilih masyarakat.

**Tabel 11. Tingkat Kecenderungan Memilih Berdasarkan Etnis**

| No.          | Nama Responden     | Asal Etnis | Paket FirmanMu | Paket Sahabat |
|--------------|--------------------|------------|----------------|---------------|
| <b>RT 01</b> |                    |            |                |               |
| 1            | Adrianus Oli       | Sabu       | ✓              |               |
| 2            | Yonarius Meo       | Bajawa     |                | ✓             |
| 3            | Fransiskus Blasar  | Ende       | ✓              |               |
| 4            | Afandi Aked        | Rote       |                | ✓             |
| 5            | Hermi Murni        | Manggarai  |                | ✓             |
| 6            | Maria Yasinta Ripo | Bajawa     | ✓              |               |
| 7            | Theresia Lamalero  | Maumere    |                | ✓             |
| 8            | Hilarious Kadju    | Bajawa     |                | ✓             |

|              |                         |            |   |   |
|--------------|-------------------------|------------|---|---|
| 9            | Hendrikus A. Koli       | Maumere    | ✓ |   |
| 10           | Ernesta Modhe           | Nagekeo    |   | ✓ |
| <b>RT 05</b> |                         |            |   |   |
| 1            | Christina Tifaona       | Lembata    |   | ✓ |
| 2            | Yonathan Gesi Radja     | Ende       | ✓ |   |
| 3            | Emirensiana Gedha       | Manggarai  |   | ✓ |
| 4            | Malinda Djampur         | Manggarai  |   | ✓ |
| 5            | Roberta Nahak           | Belu       |   | ✓ |
| 6            | Angelina Juwitan        | Manggarai  | ✓ |   |
| 7            | Antonia Asbanu          | So'e       |   | ✓ |
| 8            | Melinda Nona Ndun       | Sabu       |   | ✓ |
| 9            | Hendrika Karubun        | Belu       |   | ✓ |
| 10           | Yonathan Kore Ludji     | Sabu       | ✓ |   |
| <b>RT 09</b> |                         |            |   |   |
| 1            | Fransiskus Bambut       | Manggarai  |   | ✓ |
| 2            | Kristianus Liwa         | Nagekeo    | ✓ |   |
| 3            | Maria Novia Eo Ani      | Manggarai  |   | ✓ |
| 4            | Hamin Sukino            | Jawa       | ✓ |   |
| 5            | Servasius Taek          | Malaka     | ✓ |   |
| 6            | Aply Lamabelawa         | Lembata    |   | ✓ |
| 7            | Bonefasius Uskono       | Kefamenanu | ✓ |   |
| 8            | Albertus Bhalu          | Ende       |   | ✓ |
| 9            | Yulitha Manek           | Larantuka  | ✓ |   |
| 10           | Maria Christian Marthen | Sabu       | ✓ |   |

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa faktor etnis memiliki pengaruh yang rendah terhadap kecenderungan memilih masyarakat. Dilihat dari 30 responden diatas, terdapat 5 responden yang berasal dari Flores Manggarai yang tidak memilih Paket FirmanMu yang memiliki calon wakil walikota dari etnis Flores Manggarai, akan tetapi memilih Paket Sahabat yang berpasangan dengan orang Maumere.

Selanjutnya ada 4 responden asal etnis Sabu yang mempunyai pilihan berbeda dimana 3 responden memilih Paket FirmanMu dan yang satu memilih Paket Sahabat. Terdapat pula 2 responden asal etnis Flores Maumere yang berbeda pilihan dimana yang satu memilih Paket FirmanMu dan yang satu memilih Paket Sahabat.

Akan tetapi, apabila dilihat berdasarkan tabel diatas, maka penulis juga dapat melihat bahwa masih adanya praktek politik identitas etnis yang terjadi walaupun sangat rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari 3 responden asal etnis Sabu yang memilih Paket FirmanMu dimana calon walikotanya Jefirstson R. Riwu Kore berasal dari etnis Sabu dengan pasangannya Hermanus Man yang berasal berasal dari etnis Flores Manggarai. Responden asal etnis Rote juga memilih pasangan calon Yonas Salean yang berasal dari Rote bersama calon wakil Nikolaus Fransiskus.

#### **5.8.Dampak Politik Identitas Etnis terhadap Proses Demokrasi di Kota Kupang**

Kuatnya politik identitas etnis dalam pemilihan walikota Kupang periode 2017 – 2022 di Kelurahan Penfui, memberikan dampak dalam kehidupan berdemokrasi saat ini. Penerapan desentralisasi membuka ruang dalam berpolitik hingga memberikan kesempatan untuk kepentingan kelompok-kelompok di daerah. Namun kebebasan sebuah negara demokrasi seperti Indonesia perlu menjamin masyarakat dalam menyampaikan tuntutan dan memperjuangkan hak-hak mereka terhadap pemerintah. Adanya politik identitas etnis di Kelurahan

Penfui berdampak pada beberapa hal yang justru dapat melemahkan kualitas demokrasi.

- 1) Kuatnya politik identitas etnis telah meningkatkan persaingan dan pertentangan antar kelompok etnis di Kota Kupang khususnya di Kelurahan Penfui. Hal ini dikarenakan munculnya sentimen etnis yang dilakukan oleh elit sehingga menimbulkan penguatan identitas di masing-masing kelompok etnis. Tiap kelompok etnis berupaya untuk mendapatkan posisi politik yang kemudian akan berguna bagi kelompok mereka sendiri. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang mengedepankan prinsip persamaan dan kompetensi yang adil.
- 2) Mereproduksi aspek primordial sebagai kekuatan politik yang akan melemahkan proses demokrasi di tingkat daerah. Padahal melalui proses pemilihan walikota Kupang periode 2017 – 2022, elit dapat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat bahwa dalam memilih pemimpin harus berdasarkan pada pertimbangan objektif seperti kualitas kepemimpinan, visi misi dan rekam jejak politik para kandidat, bukan dari aspek primordial seperti kesamaan etnis.
- 3) Pengaruh politik identitas etnis akan membatasi terjadinya sirkulasi elit hanya berdasarkan faktor kesamaan etnis yang dapat hanya dikuasai oleh elit-elit daerah tersebut. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan desentralisasi yang bertujuan untuk mendorong keterbukaan dalam proses politik.



Berdasarkan dampak tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan daerah otonomi (desentralisasi) seperti Kota Kupang dapat melahirkan dampak yang akan melemahkan proses demokrasi itu sendiri. Kesempatan ini akan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok di daerah seperti kelompok etnis untuk mengaktualisasikan kepentingan mereka untuk kepentingan kelompok mereka sendiri. Hal tersebut juga terjadi saat pemilihan walikota Kupang periode 2017 – 2022, dimana elit atau kandidat menggunakan kepentingan etnis sebagai instrumen untuk mendapatkan dukungan politik.